

Belt and Road Initiative sebagai Gerbang Konektivitas di Asia Tenggara

Reyhan Erba

*Universitas Muhammadiyah Malang
Indonesia*

email: reyhanerbad@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyze the Belt and Road Initiative (BRI) as a connectivity gateway in Southeast Asia through a literature review method. The BRI, spearheaded by China, has become one of the largest global initiatives focused on infrastructure development and economic connectivity. This study reviews various literature including government reports, journal articles, books and other publications to evaluate the impact and implications of the BRI in the Southeast Asia region. The research results show that BRI has made a significant contribution to improving physical and economic connectivity between countries in Southeast Asia through infrastructure development such as roads, bridges, ports and trains. Apart from that, BRI also encourages increasing foreign direct investment and strengthening regional cooperation. However, this research also identified several challenges, including environmental sustainability issues, financial risks, and economic inequality between countries. In conclusion, although the BRI offers great opportunities for increased connectivity in Southeast Asia, a careful approach and risk mitigation strategies are needed to ensure long-term benefits for the entire region.

Keywords: *Belt and Road Initiative, BRI, Southeast Asia, Connectivity*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Belt and Road Initiative (BRI) sebagai gerbang konektivitas di Asia Tenggara melalui metode tinjauan literatur. BRI yang dipelopori oleh Tiongkok telah menjadi salah satu inisiatif global terbesar yang berfokus pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas ekonomi. Penelitian ini mengkaji berbagai literatur termasuk laporan pemerintah, artikel jurnal, buku, dan publikasi lainnya untuk mengevaluasi dampak dan implikasi BRI di kawasan Asia Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BRI telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan konektivitas fisik dan ekonomi antar negara di Asia Tenggara melalui pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan kereta api. Selain itu, BRI juga mendorong peningkatan investasi asing langsung dan memperkuat kerja sama regional. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan, termasuk isu keberlanjutan lingkungan, risiko keuangan, dan kesenjangan ekonomi antar negara. Kesimpulannya, meskipun BRI menawarkan peluang besar untuk meningkatkan konektivitas di Asia Tenggara, pendekatan yang cermat dan strategi mitigasi risiko diperlukan untuk memastikan manfaat jangka panjang bagi seluruh kawasan.

Kata-kata kunci: *Inisiatif Sabuk dan Jalan, BRI, Asia Tenggara, Konektivitas*

Pendahuluan

Tiongkok memilih Indonesia sebagai destinasi utama untuk proyek infrastruktur melalui Belt and Road Initiative (BRI) (Setiawan & Kamil, 2021) karena Indonesia dianggap sebagai negara middle power di kawasan Asia. Bagi Indonesia, yang merupakan negara berkembang dan sedang berupaya keras membangun infrastruktur di berbagai wilayahnya untuk mengejar ketertinggalan dengan negara lain, inisiatif BRI dari Tiongkok menjadi sangat menarik untuk mendukung percepatan pembangunan tersebut. Menurut Global Competitiveness Report 2015-2016 dari World Economic Forum (WEF), Indonesia masih menempati peringkat ke-62 dari 140 negara dalam pembangunan infrastruktur, yang berdampak pada perekonomian Indonesia sejak era reformasi pada akhir tahun 1990 (Amaliyah 2023). Kendati pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat pesat, pembangunan infrastruktur tidak sejalan dengan perkembangan tersebut. Infrastruktur yang kurang memadai telah menyebabkan biaya logistik tinggi, yang menghambat ekspansi ekonomi melalui efek multiplier. Untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di berbagai wilayah, dibutuhkan infrastruktur yang mumpuni untuk menopang perekonomian (Lubis 2024).

Sistem negara modern dimulai dengan kedaulatan sebagai prinsip utama dalam hubungan internasional. Kedaulatan teritorial dipahami sebagai alat untuk mengatur dan mengendalikan proses dalam urusan domestik dan internasional negara. Prinsip ini menggambarkan kekuasaan yang eksklusif untuk menentukan kebijakan di dalam batas wilayahnya. Semua teori tentang negara memiliki dampak besar terhadap negara lain. Dengan globalisasi yang semakin menguat, pergerakan orang, barang, dan jasa telah menjadi karakteristik utama dunia modern. Namun, pertanyaannya adalah apakah globalisasi telah mencapai puncaknya, dan jika ya, bagaimana reaksi global terhadap perkembangan ini. Yang pasti, pergerakan orang, barang, dan jasa akan selalu ada di seluruh dunia, baik melalui laut maupun Jalur Sutra (*Silk Road*) (Lubis 2024).

Abad 21 merupakan abad kebangkitan Cina atau lebih dikenal dengan fenomena The Rise of China. Terlebih lagi, Cina juga menunjukkan kapasitasnya sebagai regional power di Asia dan dianggap mampu berperan sebagai hegemoni dunia setelah Amerika Serikat. Kapasitas Cina dapat ditilik dari kebijakan Presiden Cina Xi Jinping dalam merealisasikan program BRI. BRI memfokuskan pada pembentukan jaringan yang memungkinkan aliran perdagangan bebas yang lebih efisien dan produktif serta integrasi lebih lanjut di pasar internasional, baik secara fisik maupun digital. BRI sendiri terdiri dari jalur sutra maritim (*maritime silk road*) dan jalur sutra darat *silk road economic belt* (Tan 2023). BRI telah menghubungkan lebih dari 65 negara dengan lebih dari 62% populasi dunia, 35% dari perdagangan dunia, dan lebih dari 31% dari PDB dunia. BRI sendiri fokus pada lima tujuan utama, yakni koordinasi kebijakan, artinya mendorong negara-negara untuk bekerja sama dalam merealisasikan berbagai proyek pembangunan. Kedua, pertukaran budaya, BRI menjadi jembatan dalam mempromosikan *people-to-people connection* dan interaksi yang ramah dengan pemahaman budaya yang baik antarperusahaan di negara-negara jalur sutra demi menciptakan kerja sama internasional yang efektif. Ketiga, BRI dirancang untuk meningkatkan kerja sama moneter dan keuangan untuk menangani resiko keuangan Bersama. Keempat, Melalui BRI, investasi dan perdagangan lintas batas diharapkan menjadi lebih mudah dan kooperatif demi mempromosikan integrasi ekonomi. Kelima, BRI berupaya untuk membangun fasilitas untuk memperluas konektivitas, seperti memperbaiki infrastruktur, membangun berbagai moda transportasi seperti kereta api, mengembangkan pelabuhan, mengembangkan jalan raya, memperbaiki transmisi listrik, dan sebagainya (Wahyuni 2023).

BRI telah menjadi motor penggerak utama dalam pembangunan infrastruktur di Asia Tenggara. Negara-negara di kawasan ini, seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand, telah menerima investasi besar-besaran dari Tiongkok untuk membangun jalan raya, pelabuhan, jalur kereta api, dan proyek energi lainnya. Hal ini tidak hanya memperbaiki infrastruktur yang ada, tetapi juga memfasilitasi konektivitas regional yang lebih baik, meningkatkan efisiensi perdagangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Misalnya, pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung di Indonesia dan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menunjukkan dampak langsung dari BRI dalam mempercepat pembangunan infrastruktur krusial di kawasan (Wahyuni 2023). Salah satu tujuan utama BRI adalah untuk meningkatkan integrasi regional melalui infrastruktur yang saling terhubung. Ini tidak hanya mempermudah transportasi barang dan orang antar-negara di Asia Tenggara, tetapi juga memfasilitasi investasi lintas batas dan kerja sama ekonomi yang lebih erat. Dengan meningkatnya konektivitas ini, negara-negara ASEAN dapat lebih efektif memanfaatkan potensi ekonomi masing-masing dan bersaing secara global. Peningkatan konektivitas ini juga diharapkan dapat mengurangi disparitas pembangunan antar-negara di kawasan. BRI juga memiliki dampak signifikan dalam memperkuat keamanan energi di Asia Tenggara.

Melalui proyek-proyek infrastruktur energi, seperti pembangkit listrik tenaga batu bara dan pembangkit listrik tenaga air, BRI membantu negara-negara di kawasan untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi yang tidak stabil dan meningkatkan keberlanjutan energi. Ini juga memungkinkan diversifikasi sumber daya energi nasional dan regional, yang merupakan langkah penting menuju ketahanan energi yang lebih baik di BRI tidak hanya merupakan inisiatif infrastruktur, tetapi juga alat diplomasi ekonomi yang kuat bagi Tiongkok. Melalui proyek-proyek ini, Tiongkok dapat memperkuat hubungan diplomatiknya dengan negara-negara di Asia Tenggara, memperluas pengaruhnya, dan membangun kemitraan ekonomi yang saling menguntungkan. Namun, kehadiran Tiongkok yang semakin kuat juga memunculkan kekhawatiran akan dominasi ekonomi dan politik di kawasan ini, khususnya di antara negara-negara yang memiliki sengketa wilayah dengan Tiongkok seperti Vietnam dan Filipina. Oleh karena itu, sementara BRI memberikan manfaat ekonomi yang jelas, penting juga untuk mempertimbangkan implikasi geopolitik jangka panjang dari inisiatif ini bagi stabilitas regional masa depan (Xiong 2024).

Dengan demikian, fenomena pendukung seperti pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, integrasi regional, keamanan energi, dan hubungan diplomatik yang diperkuat merupakan latar belakang penting untuk memahami dampak BRI di Asia Tenggara. Perkembangan ini menandakan kompleksitas dinamika politik, ekonomi, dan strategis di kawasan yang akan terus berkembang seiring berjalannya waktu (Bin 2023). Dalam beberapa dekade terakhir, proliferasi institusi regional meningkat, seperti EU, ASEAN, NAFTA, dan sebagainya. Berbagai institusi regional tersebut memperlihatkan, bahwa kedekatan geografis merupakan salah satu unsur penting dalam menjalin kerja sama di tingkat regional. Institusi-institusi regional tersebut memudahkan aktivitas perdagangan, meminimalisir hambatan tarif dan nontarif, mengurangi biaya perdagangan, dan lebih mudah untuk memproyeksikan kekuatan militer di kawasan. Negara-negara yang berada dalam kawasan yang sama juga cenderung memiliki kepentingan yang sama dalam menciptakan skala ekonomi yang lebih besar. Dalam beberapa dekade terakhir, proliferasi institusi regional meningkat, seperti EU, ASEAN, NAFTA, dan sebagainya. Berbagai institusi regional tersebut memperlihatkan, bahwa kedekatan geografis merupakan salah satu unsur penting dalam menjalin kerja sama di tingkat regional. Institusi-institusi regional tersebut memudahkan aktivitas perdagangan, meminimalisir hambatan tarif dan nontarif, mengurangi biaya perdagangan, dan lebih mudah untuk memproyeksikan kekuatan militer di kawasan. Negara-negara yang berada dalam kawasan yang sama juga cenderung memiliki

kepentingan yang sama dalam menciptakan skala ekonomi yang lebih besar (Dwipradinata 2024).

BRI telah menciptakan koridor ekonomi baru di Asia Tenggara, menghubungkan wilayah-wilayah penting ekonomi dari Tiongkok hingga ke Asia Tenggara dan sebaliknya. Koridor ini tidak hanya memfasilitasi aliran barang dan investasi, tetapi juga membuka peluang baru bagi pembangunan industri dan jaringan pasokan regional. Misalnya, melalui proyek-proyek infrastruktur seperti jalur kereta api dan jalur laut, BRI mendorong integrasi ekonomi yang lebih dalam antara negara-negara ASEAN, memperluas pasar regional, dan meningkatkan daya saing mereka di pasar global. Salah satu dampak signifikan dari BRI di Asia Tenggara adalah peningkatan kapasitas transportasi dan logistik. Infrastruktur baru seperti pelabuhan modern, bandara internasional, dan jaringan jalan raya yang lebih baik telah mempercepat aliran barang dan orang di kawasan ini. Ini tidak hanya meningkatkan efisiensi perdagangan, tetapi juga mengurangi biaya logistik, yang pada gilirannya memperkuat daya tarik investasi dan pertumbuhan ekonomi. Misalnya, pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung di Indonesia telah mengubahnya menjadi pusat logistik penting di Asia Tenggara dan membuka akses lebih luas bagi ekspor dan impor (Wahyuni 2023).

China menyatakan bahwa proyek besar lintas benua BRI yang pertama kali diusulkan oleh Presiden Xi Jinping pada tahun 2013 di Kazakhstan, telah memberikan kontribusi bagi sejumlah negara dan meningkatkan kesejahteraan regional. Dalam laporan resmi berjudul *"The Belt and Road Initiative Progress, Contribution, and Prospect"* yang diterbitkan pada April 2019, pemerintah China menyebutkan bahwa sejak 2013, proyek BRI telah berkembang secara signifikan dengan banyak kemajuan yang dicapai, termasuk proyek-proyek unggulan di beberapa negara yang diklaim memberikan manfaat bagi negara-negara peserta. Sesuai dengan tujuannya, pemerintah China menyatakan bahwa BRI telah berhasil dalam mengoordinasikan kebijakan, membangun jaringan infrastruktur, memfasilitasi perdagangan bebas, mengintegrasikan keuangan kawasan, dan mempererat hubungan antar masyarakat. Selama enam tahun pelaksanaan BRI, laporan perkembangan tersebut mengungkapkan bahwa pemerintah China telah menandatangani 173 perjanjian kerja sama dengan 125 negara dari Asia, Eropa, Afrika, dan Amerika Latin, serta dengan 29 organisasi internasional. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa volume perdagangan antara China dan negara-negara di koridor BRI meningkat 16,4% setiap tahun, mencapai total US\$ 1,3 triliun pada tahun 2018 (Wahyuni 2023).

BRI yang diinisiasi oleh Republik Rakyat Tiongkok telah menjadi salah satu proyek ambisius yang menarik perhatian global sejak diperkenalkannya pada tahun 2013 oleh Presiden Xi Jinping. Inisiatif ini bertujuan untuk membangun jaringan konektivitas infrastruktur yang luas, menghubungkan Asia, Eropa, dan Afrika melalui jalur perdagangan kuno Jalur Sutra. Di Asia Tenggara, BRI dianggap sebagai peluang besar untuk meningkatkan konektivitas regional, memperluas akses pasar, serta menghidupkan kembali jalur perdagangan maritim yang strategis. Namun, dampak dan tantangan dari implementasi BRI di kawasan ini juga menjadi perhatian serius (Dwipradinata 2024).

Asia Tenggara, dengan keragaman budaya, ekonomi, dan politiknya, berada di persimpangan yang penting dalam pelaksanaan BRI. Negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam telah menunjukkan minat dalam menerima investasi dan pembangunan infrastruktur dari Tiongkok sebagai bagian dari inisiatif ini. Karena geografisnya yang strategis dan statusnya sebagai hub perdagangan utama, kawasan ini

menjadi pusat perhatian dalam strategi Tiongkok untuk memperluas pengaruhnya secara ekonomi dan politik di tingkat global.

Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji bagaimana BRI mempengaruhi dinamika politik, ekonomi, dan sosial di Asia Tenggara. Pembangunan infrastruktur yang dipercepat dapat menghadirkan peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, tetapi juga menimbulkan risiko terkait dengan transparansi, utang luar negeri, dan dampak lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana BRI berperan sebagai gerbang konektivitas di Asia Tenggara, dengan fokus pada dampaknya terhadap pembangunan regional dan integrasi ekonomi (Wahyuni 2023). Dalam hal ini, kerangka teoretis yang relevan meliputi konsep-konsep seperti geopolitik ekonomi, teori hubungan internasional, dan analisis kebijakan publik akan digunakan untuk menjelaskan dinamika yang terlibat dalam implementasi BRI di Asia Tenggara. Selain itu, studi ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor kritis yang mempengaruhi penerimaan dan implementasi BRI di negara-negara ASEAN, serta mengeksplorasi peran aktor-aktor utama seperti pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam proses ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang dampak dan implikasi BRI sebagai inisiatif strategis bagi konektivitas regional di Asia Tenggara (Zuliyani 2024).

Tantangan utama yang dihadapi oleh Asia Tenggara dalam menerima dan mengimplementasikan BRI adalah menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan kekhawatiran terkait kedaulatan, lingkungan, dan keberlanjutan. Meskipun infrastruktur yang diperbarui dapat meningkatkan konektivitas regional dan memfasilitasi perdagangan serta investasi, ada kekhawatiran bahwa proyek-proyek BRI dapat mengakibatkan ketergantungan ekonomi yang lebih besar pada Tiongkok. Negara-negara ASEAN juga dihadapkan pada risiko terkait utang luar negeri yang meningkat, yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan keuangan mereka (Dewi 2024). Selain itu, dampak lingkungan dari proyek-proyek infrastruktur yang besar perlu dipertimbangkan secara serius. Pembangunan yang cepat dan intensif dapat meningkatkan tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk kerusakan ekosistem dan perubahan iklim. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan kerangka kerja yang memadai untuk memantau dan mengelola dampak lingkungan dari proyek BRI agar dapat memastikan keberlanjutan jangka panjang bagi kawasan tersebut (Dwipradinata 2024).

Selanjutnya, dalam konteks politik, implementasi BRI juga dapat memperdalam polarisasi politik di beberapa negara di Asia Tenggara. Penerimaan terhadap proyek-proyek BRI tidak merata di seluruh kawasan, dengan beberapa negara menunjukkan sikap skeptis atau bahkan menolak terlibat dalam inisiatif tersebut. Faktor-faktor seperti masalah hak asasi manusia, tata kelola yang buruk, dan ketegangan geopolitik dapat mempengaruhi keputusan politik dan sosial terkait BRI di tingkat nasional dan regional. Akhirnya, penelitian ini juga akan menggali potensi kolaborasi dan keuntungan yang dapat diperoleh negara-negara ASEAN melalui BRI. Meskipun ada tantangan yang perlu diatasi, inisiatif ini juga memberikan kesempatan untuk memperluas infrastruktur kawasan, meningkatkan konektivitas antar-negara, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan memanfaatkan potensi ini secara bijaksana, ASEAN dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk memperkuat posisinya dalam jaringan ekonomi global yang semakin terintegrasi (Dwipradinata 2024).

Diskusi tentang hubungan Indonesia dan China selalu menarik, terutama dalam konteks kebangkitan China pada abad ke-21 yang sering disebut "*The Rise of China*". China menunjukkan kekuatannya sebagai kekuatan regional di Asia dan berpotensi menjadi hegemon global setelah Amerika Serikat. Salah satu kebijakan utama yang

mencerminkan kapasitas China adalah program BRI yang diinisiasi oleh Presiden Xi Jinping. Program ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas global, baik dengan negara maju maupun berkembang, dengan fokus pada pembentukan jaringan perdagangan bebas yang efisien dan integrasi pasar internasional (Yuniarto 2020).

Deng Xiaoping mengambil kebijakan liberalisasi ekonomi setelah bertemu dengan presiden Amerika Serikat Jimmy Carter pada tahun 1979. Pertemuan ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya antara Mao Zedong dengan Gerald Ford pada tahun 1975, yang merupakan momen kunci dalam Perang Dingin. Kedua pertemuan ini menjadi titik balik penting dalam pembangunan ekonomi Tiongkok di periode berikutnya. Kebijakan *One Belt One Road* (OBOR) atau yang sekarang dikenal sebagai *Belt and Road Initiative* (BRI) pada era Xi Jinping sebenarnya merupakan kelanjutan dari langkah-langkah revolusioner yang dilakukan oleh para pendahulunya, Mao Zedong dan Deng Xiaoping. Deng Xiaoping dikenal sebagai arsitek utama reformasi ekonomi yang mengubah Tiongkok dari negara yang terisolasi dan miskin menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia (Zuliyani 2024). Beberapa kebijakan liberalisasi ekonomi Tiongkok era Deng Xiaoping meliputi reformasi pertanian sebagai langkah pertama (Mahendra 2023).

Kebijakan ini mengizinkan petani untuk memiliki dan mengelola lahan pertanian mereka sendiri, yang sebelumnya dikendalikan oleh komune pertanian kolektif. Langkah ini memberikan insentif kepada petani untuk bekerja lebih keras karena mereka dapat memperoleh keuntungan dari hasil pertanian mereka sendiri. Akibatnya, produksi pertanian Tiongkok mengalami peningkatan yang signifikan. Kedua, Zona Ekonomi Khusus (SEZ) adalah daerah yang diberikan berbagai insentif ekonomi, seperti regulasi perdagangan yang lebih liberal, pembebasan pajak, dan perlakuan istimewa bagi investasi asing. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menarik investasi dan mendorong pertumbuhan sektor manufaktur serta ekspor. Ketiga, investasi asing mulai dibuka oleh Tiongkok, mencakup kemitraan dengan perusahaan asing dalam bentuk *joint ventures* di berbagai sektor industri. Kebijakan ini merupakan strategi Tiongkok untuk memperoleh teknologi, modal, dan pengelolaan dari luar negeri guna mendukung pertumbuhan ekonominya.

Keempat, Tiongkok secara bertahap menghapuskan berbagai hambatan perdagangan melalui liberalisasi perdagangan, yang memungkinkan barang-barang impor masuk ke pasar domestiknya. Selain itu, negara ini aktif dalam negosiasi perjanjian perdagangan internasional seperti keanggotaannya di World Trade Organization (WTO) pada tahun 2001, yang membuka peluang perdagangan global yang lebih besar. Kelima, sentralisasi ekonomi dikurangi dengan memberikan lebih banyak otonomi kepada unit-unit ekonomi di tingkat provinsi dan lokal. Hal ini memungkinkan daerah untuk mengembangkan inisiatif ekonomi sendiri dan merespons lebih baik terhadap kebutuhan pasar. Keenam, pemerintah memberikan insentif ekonomi kepada perusahaan dan individu yang mencapai kinerja ekonomi yang baik. Langkah ini bertujuan untuk mendorong semangat berwirausaha dan inovasi di Tiongkok. Salah satu dari investasi terbesar Tiongkok untuk memperkuat perekonomiannya adalah melalui penciptaan BRI dan Kazakhstan pada tahun 2013. Tujuan utama dari pembentukan BRI adalah untuk meningkatkan perekonomian global dan membuka jalur perdagangan baru yang dapat meningkatkan peluang bisnis, termasuk dalam hal ekspor, impor, dan investasi bagi Tiongkok (Xiong 2024).

Pengelolaan BRI diawali oleh The National Development and Reform Commission (NDRC) yang dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri Zhang Gaoli. Pada tahun 2014, Tiongkok mengalokasikan modal awal sebesar \$25,5 miliar atau sekitar Rp3,9 triliun

untuk mendukung pembangunan jalur sutra ini, menggunakan sumber dana dari devisa negara, bank ekspor dan impor, serta perusahaan investasi. Tahun 2015 menjadi awal dimulainya pembangunan jalur BRI Tiongkok (Xiong 2024). BRI mencakup Jalur Sutra Maritim dan Jalur Sutra Darat, menghubungkan lebih dari 65 negara yang mencakup lebih dari 62% populasi dunia, 35% perdagangan dunia, dan 31% PDB dunia. BRI berfokus pada lima tujuan utama. Pertama, koordinasi kebijakan, yaitu mendorong kerjasama antar negara dalam proyek pembangunan. Kedua, pertukaran budaya, yaitu mempromosikan koneksi antar masyarakat dan interaksi budaya untuk menciptakan kerjasama internasional yang efektif. Tiga, integrasi keuangan, yaitu meningkatkan kerjasama moneter dan keuangan untuk mengelola risiko bersama. Keempat, perdagangan dan investasi, yaitu mempermudah investasi dan perdagangan lintas batas untuk mempromosikan integrasi ekonomi. Kelima, konektivitas fasilitas, yaitu membangun infrastruktur dan moda transportasi seperti kereta api, pelabuhan, jalan raya, dan transmisi listrik untuk memperluas konektivitas.

Indonesia merupakan salah satu negara besar yang terlibat dalam jalur sutra maritim dan darat dalam peta BRI. Peningkatan hubungan antara Indonesia dan China juga terlihat pada perayaan 65 tahun hubungan bilateral kedua negara, di mana Presiden Jokowi mengunjungi China pada 25-28 Maret 2015. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi dan Presiden Xi Jinping membahas berbagai sektor seperti perdagangan, keuangan, infrastruktur, industri, pariwisata, dan hubungan antar masyarakat untuk memperkuat kerjasama ekonomi-politik dan hubungan diplomatik kedua negara. Oleh karena itu, tulisan ini akan mengkaji secara lebih mendalam kerja sama ekonomi dan politik antara Indonesia dan China dalam program BRI serta dampaknya terhadap pembangunan Indonesia (Masduki 2023).

Selama dua dekade terakhir, China telah berupaya mengurangi ketergantungan pada Selat Malaka. Meskipun berbagai alternatif telah diusulkan oleh para pembuat kebijakan strategis di China, belum ada yang mampu sepenuhnya menghilangkan ketergantungan tersebut. Salah satu solusi adalah pembangunan Kanal Kra Isthmus di Thailand, namun ini dianggap tidak layak karena biaya tinggi dan masalah keamanan. Alternatif lain adalah menggunakan Selat Sunda dan Selat Lombok, tetapi Selat Sunda terlalu dangkal untuk kapal besar China dan Selat Lombok terlalu jauh sehingga meningkatkan biaya. China juga membangun jalur pipa dari Sittwe di Myanmar ke Kunming di Provinsi Yunnan, tetapi ini belum signifikan mengurangi ketergantungan pada Selat Malaka. China terus mencari solusi lain, termasuk pembangunan Pelabuhan Gwadar di Pakistan, yang memungkinkan pengiriman suplai energi dari Pakistan ke Kashgar di Provinsi Xinjiang (Kusumawardhana 2023).

Oleh karena itu, China tetap harus mengandalkan negara-negara yang memiliki kedaulatan di sepanjang Selat Malaka, terutama Indonesia yang memiliki garis pantai terpanjang dan menerapkan prinsip bebas-aktif dalam politik luar negeri, terutama dalam pengaruh di Selat Malaka. Dalam beberapa tahun terakhir, China telah menggunakan "soft power" melalui investasi di negara-negara berkembang, yang menjanjikan pertumbuhan ekonomi yang menguntungkan melalui dukungan pembangunan infrastruktur dan kerjasama bilateral dalam ekspor-impor. Soft power, seperti dijelaskan oleh Joseph Nye, adalah pengaruh yang diperoleh suatu negara atas negara lain dengan cara yang lebih persuasif, tanpa menggunakan tindakan militer atau ancaman kekerasan. China telah mengadopsi pendekatan ini dalam hubungannya dengan Indonesia, dengan tujuan melindungi kepentingannya di Selat Malaka. China mendukung penuh upaya Indonesia dalam menjaga keamanan di Selat Malaka, khususnya dalam melindungi pelayaran nasional dan internasional dari ancaman perompakan. Selain itu, China juga mendukung pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia di bidang teknologi kemaritiman (Kusumawardhana 2023).

Sebagai contoh untuk menggambarkan peran BRI, dapat dilihat di hubungan China dan Indonesia. China dan Indonesia telah menjalin hubungan diplomatik selama 71 tahun sejak 1950, dimulai saat era kepemimpinan Soekarno, yang memiliki hubungan dekat dengan pendiri Republik Rakyat China, Mao Zedong, berbasis ideologi komunis. Hubungan diplomasi antara kedua negara ini telah melalui berbagai tantangan, termasuk pemutusan hubungan diplomatik pada era Gerakan 30 September (G30S) tahun 1965, saat Partai Komunis Indonesia (PKI) melakukan percobaan kudeta terhadap pemerintah Indonesia (Kusumawardhana 2023). Sejak merdeka, Indonesia telah menjadi negara penting yang mendukung partisipasi China dalam Konferensi Asia-Afrika (KAA) tahun 1955 di Bandung. Dari awal, Indonesia telah mengadopsi politik luar negeri 'bebas aktif', yang tidak terpengaruh oleh kekuatan blok Barat maupun Timur, yang diperkuat oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Keikutsertaan China dalam KAA di Indonesia pada 1955 berarti peningkatan dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan China, dan memberikan dampak baru pada politik luar negeri Indonesia. Situasi ini mempengaruhi hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat (AS), yang khawatir bahwa pengaruh China dapat menggeser posisi AS dalam politik luar negeri Indonesia. Akibatnya, rezim Orde Lama di bawah kepemimpinan Soekarno jatuh dan digantikan oleh rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto, yang lebih berorientasi ke AS dan berupaya untuk memerangi pengaruh komunis dalam politik global.⁷ Sekarang ini, hubungan diplomatik antara Indonesia dan China semakin membaik, ditandai dengan kerja sama dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, dengan memanfaatkan teknologi dan sumber daya manusia dari China. Ini merupakan bagian dari agenda besar China dalam konsep *Belt Road Initiative* (BRI) atau One Belt One Road (OBOR), yang diusulkan oleh Presiden seumur hidup China, Xi Jinping (Korwa 2019).

BRI adalah konsep yang diusulkan oleh Xi Jinping pada tahun 2013 selama Konferensi Tingkat Tinggi China di Beijing. BRI adalah agenda kerja sama perdagangan terbuka yang diinisiasi oleh China, yang mencakup jalur perdagangan global baik melalui darat maupun laut, dengan menghubungkan jalur perdagangan global yang telah ada sejak zaman kuno China, kira-kira 200 tahun sebelum Masehi, ketika Dinasti Han memerintah China. BRI akan diimplementasikan melalui pembangunan infrastruktur darat dan laut oleh China di negara-negara yang setuju untuk bergabung dalam inisiatif BRI dan bersifat multilateral.⁹ BRI terdiri dari dua komponen utama: "Jalur Ekonomi Sabuk Sutra" yang berfokus pada jalur darat, dan "Jalur Sutra Maritim Abad Ke-21" yang berfokus pada jalur laut. BRI tidak hanya melibatkan pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, rel kereta api, dan pelabuhan, tetapi juga termasuk upaya-upaya untuk mempromosikan perdagangan bebas, kerja sama ekonomi, dan pemahaman budaya (Wahyuni 2023).

China telah menggunakan BRI sebagai sarana untuk mengekspansi pengaruhnya di panggung internasional dan memperkuat posisinya sebagai kekuatan ekonomi global. BRI telah memberikan China kesempatan untuk membangun hubungan bilateral yang kuat dengan negara-negara di sepanjang jalur tersebut, seringkali dalam hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan perdagangan. Secara geopolitik, ini memungkinkan China untuk menentukan dan mempengaruhi pembangunan ekonomi dan strategi regional di sejumlah negara. Secara ekonomi, BRI memiliki potensi untuk mengubah peta perdagangan dan investasi global. Dengan meningkatkan konektivitas antara China dan negara-negara lainnya, BRI bisa memfasilitasi peningkatan arus barang, layanan, dan investasi. Ini berpotensi menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, menciptakan lapangan kerja baru, dan memperdalam integrasi

ekonomi global. BRI juga memunculkan beberapa tantangan. Beberapa negara khawatir bahwa utang yang terkait dengan proyek-proyek BRI dapat menimbulkan masalah keuangan dan politik. Beberapa proyek BRI telah menimbulkan kontroversi dan resistensi lokal karena masalah lingkungan, sosial, dan korupsi. Ini menunjukkan bahwa BRI bukan hanya inisiatif ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi politik dan sosial yang penting (Devi 2023).

Tingkat potensi ekonomi Asia Tenggara membuatnya menjadi fokus utama untuk pembangunan global. Kekayaan alam dan stabilitas regional menciptakan lingkungan yang mendukung perdagangan dan investasi, menjadikannya tujuan strategis bagi kekuatan global. China melihat Asia Tenggara sebagai area kunci untuk mewujudkan proyek pembangunan ekonomi global dalam kerangka OBOR, serta sebagai kesempatan untuk memperkuat peran dan pengaruhnya di wilayah tersebut (Lubis 2024). Indonesia memiliki lokasi geografis yang strategis, berada di Asia Tenggara dan menjadi persimpangan perdagangan dunia. Terletak di antara benua Australia, Asia Timur, dan Asia Selatan, sehingga banyak negara memiliki kepentingan dalam mengamankan jalur ekonomi yang melintasi Selat Malaka dan Laut China Selatan. Mengingat pentingnya ekonomi dalam pembangunan suatu negara, hal ini tentu berdampak pada keamanan kepentingan terkait lainnya, yaitu politik dan pertahanan. Oleh karena itu, ketiga hal ini menjadi kepentingan utama bagi setiap negara untuk diamankan. Kebijakan BRI China juga menysasar Indonesia. Mengingat lokasi geografis strategis Indonesia yang berada di persimpangan perdagangan dunia, hal ini menarik minat China untuk menjalin kerjasama dengan Indonesia. Hal ini disambut baik oleh Joko Widodo, presiden terpilih. China menjadi negara pertama yang dikunjungi pada 8 November 2014, bersamaan dengan KTT APEC di Beijing, China. Investasi China dalam proyek BRI terus meningkat setiap tahun. Dari 28 kerjasama antara Indonesia dan China dalam kerangka ini, nilainya mencapai US \$ 91 miliar, atau lebih dari Rp 1.288 triliun (Lubis 2024).

Kerjasama antara negara-negara dalam BRI dimaksudkan untuk menciptakan 'ruang kolaboratif bagi hubungan manusia dalam satu pertemuan sosial-budaya'. Kerjasama ini menyajikan peta jalan tentang bagaimana semua negara dapat memainkan strategi kerjasama yang terintegrasi dalam satu kerjasama global. Kolaborasi BRI dilakukan dengan menggunakan diplomasi *soft power* melalui bantuan luar negeri dan kemanusiaan, pariwisata, serta perluasan pendidikan melalui pertukaran pelajar dan budaya, dan pembukaan cabang institut Konfusius di seluruh dunia. Melalui BRI, China membujuk banyak negara untuk mengikuti inisiatifnya dan memperdalam hubungan antara bangsa dan budaya mereka dengan negara-negara di koridor BRI (Dellios, 2017). Di sisi lain, inisiatif ini juga merupakan strategi untuk memperkuat pengaruh China, sambil mengintegrasikan semua kepentingan ekonomi, politik, budaya, dan keamanan internal dan eksternal ke dalam pengaruh China (Mitrovic, 2018). Dalam teori dan praktik, BRI ini menjadi instrumen dan kerangka diplomasi internasional untuk 'meregionalisasi China/globalisasi', gerakan pemuliaan kebangkitan China, dan 'memfokuskan kembali' perhatian pada China (Korwa, 2019).

China, yang memiliki hubungan kuat dengan negara-negara Asia Tenggara, khususnya anggota Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), telah lama menyebarkan pengaruhnya di kawasan tersebut. Hubungan strategis antara kedua kawasan ini dimulai pada tahun 1970-an ketika Beijing berusaha memperbaiki citra buruknya pasca Revolusi Kebudayaan melalui komunikasi informal dengan pemerintah negara-negara Asia Tenggara. Selain membangun hubungan informal, China juga memberikan dukungan revolusioner kepada negara-negara Asia Tenggara, meskipun dukungan ini lebih dianggap sebagai inspirasi bagi negara-negara tersebut. Dengan adanya proyek BRI yang mencakup kawasan Asia Tenggara, terbukti bahwa China masih terus berambisi untuk menyebarkan pengaruhnya. Hal ini didukung oleh pernyataan Liu & Lim yang

menyebutkan bahwa pemerintah dan perusahaan China berusaha menciptakan gelombang ekonomi dengan tanggung jawab korporat, membangun hubungan dengan elit berwenang, dan berinvestasi di negara-negara setempat. Ini menjelaskan mengapa China memiliki posisi penting dalam sektor perekonomian, dan BRI merupakan program pengembangan ekonomi yang sangat strategis mengingat negara-negara Asia Tenggara menargetkan integrasi ekonomi regional, perdagangan internasional, dan investasi asing. Contohnya, Filipina yang menghadapi krisis infrastruktur diuntungkan dengan adanya investor dan akses ke Red Market melalui keanggotaan BRI, sementara Singapura sangat bergantung pada perdagangan (Korwa 2019).

Gong menjelaskan bahwa China memperkuat pengaruh ekonominya melalui kebijakan-kebijakan yang memungkinkan China menjadi salah satu aktor utama dalam menggerakkan perekonomian Asia Tenggara. Ekspansi pengaruh China melalui BRI tidak lepas dari unsur politik yang berpotensi mengubah tatanan ekonomi di kawasan tersebut. Meskipun BRI menawarkan peluang besar bagi negara-negara Asia Tenggara, proyek ini tetap mendapat kritik dan sentimen negatif dari berbagai pihak. Liu & Lim menyoroti tindakan China yang mengamankan saham di proyek infrastruktur terbesar di Malaysia. Persyaratan yang diajukan China untuk pembangunan East Coast Rail Link (ECRL) membuat Malaysia menolak memenuhinya dan menolak kelonggaran pada proyek tersebut. Ambisi China di Asia Tenggara juga menimbulkan kekhawatiran atas dominasi China, potensi kembalinya kekuasaan historis, legitimasi kehadiran militer, serta klaim China di Laut Cina Selatan (LCS). Dalam menanggapi agresivitas China, beberapa negara di Asia Tenggara menerapkan strategi hedging dengan kebijakan berbeda-beda terhadap BRI. Misalnya, Vietnam, Indonesia, dan Thailand mendukung proyek tersebut namun tetap selektif dalam partisipasinya (Cai 2017).

Selanjutnya, dalam artikel yang berjudul Analisis Masuknya Belt and Road Initiative Tiongkok ke ASEAN dan Identitas yang Dipromosikan oleh Tiongkok, disebutkan bahwa negara-negara anggota ASEAN menerima proyek OBOR China karena melihatnya sebagai solusi yang optimal untuk meningkatkan konektivitas regional. Pembiayaan infrastruktur dan peluang investasi asing di bawah kerangka kerja BRI China menunjukkan penerimaan proyek tersebut oleh negara-negara di Asia Tenggara, meskipun kekhawatiran tentang hutang luar negeri juga mempengaruhi dampak positif proyek BRI di kawasan ini (Agustian, Nizmi, & Waluyo, 2021).

Dari perspektif China, ASEAN menjadi kawasan yang menjanjikan untuk mengembangkan kekuatan ekonominya di masa mendatang. Dalam tulisan yang berjudul *China's Belt and Road Initiative and Its Implications for ASEAN: An Introduction*, dijelaskan bahwa proyek BRI di Asia Tenggara dapat dimanfaatkan oleh China sebagai jalur untuk memindahkan sektor industri dan mengarahkan rantai pasokan ke ASEAN, sebagai upaya mengantisipasi dampak jangka panjang dari ketegangan ekonomi dengan Amerika Serikat. Dalam konteks yang sama, artikel *China and the BRI: Challenges and Opportunities for Southeast Asia* menjelaskan bahwa meskipun negara-negara di Asia Tenggara menunjukkan sikap skeptis terhadap proyek BRI sebagai respons terhadap ketidakpastian ekonomi global, kritikus tetap menganggap bahwa kawasan ini memberikan peluang bagi peningkatan pengaruh China. Selain itu, terdapat potensi meningkatnya ketergantungan terhadap China di kawasan tersebut (Nye 2018). Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sejauh mana dampak dan implikasi inisiatif BRI dari China terhadap konektivitas ekonomi dan politik di kawasan Asia Tenggara. Fokus utama mencakup evaluasi terhadap penerimaan dan implementasi proyek-proyek infrastruktur BRI di negara-negara ASEAN, serta analisis terhadap dampak ekonomi, sosial, dan politik dari integrasi yang dipercepat melalui jalur darat dan laut yang diusung oleh inisiatif ini.

Selain itu, makalah juga akan mengeksplorasi dinamika politik regional yang mungkin timbul sebagai respons terhadap meningkatnya dominasi China dalam ekonomi regional melalui BRI, termasuk tantangan dan peluang yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN dalam menjaga keseimbangan kepentingan domestik dan internasional dalam era globalisasi yang semakin terintegrasi.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang melibatkan pengumpulan data dari sumber pustaka, atau penelitian yang objeknya dieksplorasi melalui berbagai informasi pustaka seperti buku, ensiklopedia, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen. Penelitian kepustakaan atau kajian literatur (*literature review, literature research*) adalah penelitian yang mengkaji atau meninjau secara kritis pengetahuan, gagasan, atau temuan yang terdapat dalam literatur berorientasi akademik, serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologisnya terhadap topik tertentu. Fokus penelitian kepustakaan adalah menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, atau gagasan yang digunakan untuk menganalisis dan memecahkan pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif, yaitu penguraian data yang telah diperoleh secara teratur, kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca (Pusparani 2021).

Teori

BRI adalah konsep yang diusulkan oleh Xi Jinping pada tahun 2013 selama Konferensi Tingkat Tinggi China di Beijing. Inisiatif ini merupakan agenda kerja sama perdagangan terbuka yang diinisiasi oleh China, yang mencakup jalur perdagangan global baik melalui darat maupun laut, dengan menghubungkan jalur perdagangan global yang telah ada sejak zaman kuno China, kira-kira 200 tahun sebelum Masehi, ketika Dinasti Han memerintah China. BRI akan diimplementasikan melalui pembangunan infrastruktur darat dan laut oleh China di negara-negara yang setuju untuk bergabung dalam inisiatif BRI dan bersifat multilateral. BRI terdiri dari dua komponen utama: "Jalur Ekonomi Sabuk Sutra" yang berfokus pada jalur darat, dan "Jalur Sutra Maritim Abad Ke-21" yang berfokus pada jalur laut. BRI tidak hanya melibatkan pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, rel kereta api, dan pelabuhan, tetapi juga termasuk upaya-upaya untuk mempromosikan perdagangan bebas, kerja sama ekonomi, dan pemahaman budaya (Lubis 2024).

BRI adalah sebuah program ekonomi yang berfokus pada pembentukan jaringan untuk memungkinkan aliran perdagangan bebas yang lebih efisien dan produktif serta integrasi lebih lanjut di pasar internasional, baik secara fisik maupun digital. Berbagai institusi regional tersebut menunjukkan bahwa kedekatan geografis merupakan salah satu unsur penting dalam menjalin kerja sama di tingkat regional. Institusi-institusi ini memudahkan aktivitas perdagangan, meminimalkan hambatan tarif dan nontarif, mengurangi biaya perdagangan, dan mempermudah proyeksi kekuatan militer di kawasan (Lubis 2024).

Hasil dan Pembahasan

Untuk memahami secara mendalam tentang dampak BRI sebagai gerbang konektivitas di Asia Tenggara, tinjauan literatur menjadi krusial dalam merangkum pandangan dan penelitian terdahulu. Secara umum, literatur mengenai BRI sering kali menyoroti dua dimensi utama: dampak ekonomi dan implikasi politik serta keamanannya. Dari segi

ekonomi, banyak penelitian menekankan potensi positif BRI dalam meningkatkan konektivitas infrastruktur regional. Misalnya, infrastruktur transportasi dan energi yang dibangun dapat memperkuat integrasi ekonomi di antara negara-negara ASEAN dan Tiongkok, serta meningkatkan efisiensi logistik dan biaya perdagangan. BRI mendorong investasi asing langsung, menciptakan lapangan kerja, dan merangsang pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Di sisi lain, dampak politik dan keamanan dari BRI juga menjadi perhatian penting. Literatur telah menyoroti bagaimana kehadiran Tiongkok melalui BRI mempengaruhi dinamika politik regional di Asia Tenggara. Beberapa negara ASEAN mungkin merasa tergantung secara ekonomi pada Tiongkok, yang dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri mereka terhadap isu-isu sensitif seperti sengketa wilayah di Laut China Selatan. BRI dapat digunakan oleh Tiongkok sebagai instrumen untuk memperluas pengaruh politiknya di kawasan tersebut. Dalam melengkapi tinjauan literatur mengenai BRI sebagai gerbang konektivitas di Asia Tenggara, ada beberapa aspek tambahan yang perlu diperhatikan dari berbagai penelitian terdahulu. Salah satunya adalah analisis terhadap dampak lingkungan dari proyek infrastruktur besar yang dibangun dalam kerangka BRI. Meskipun BRI diharapkan dapat meningkatkan integrasi ekonomi dan konektivitas regional, pembangunan infrastruktur yang besar juga dapat berdampak negatif terhadap lingkungan, seperti deforestasi, degradasi lahan, dan peningkatan emisi karbon.

Selain itu, literatur juga menyoroti tantangan dan risiko finansial yang mungkin dihadapi oleh negara-negara penerima BRI. Meskipun Tiongkok menawarkan investasi besar dalam infrastruktur, ada kekhawatiran bahwa negara-negara penerima mungkin terjebak dalam utang yang sulit untuk dikembalikan. Meskipun ada manfaat ekonomi yang signifikan, negara-negara ASEAN harus waspada terhadap potensi jebakan utang yang dapat mengikat mereka dalam ketergantungan ekonomi yang lebih besar pada Tiongkok. Di samping itu, tinjauan literatur juga menyoroti peran aktor non-negara, seperti perusahaan swasta dan organisasi masyarakat sipil, dalam pelaksanaan proyek-proyek BRI. Keterlibatan aktor non-negara ini dapat mempengaruhi dinamika sosial dan politik di tingkat lokal di negara-negara ASEAN, serta mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan proyek infrastruktur yang dilaksanakan. Dengan demikian, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami secara menyeluruh berbagai aspek dampak BRI di Asia Tenggara, termasuk dampak lingkungan, keuangan, serta peran aktor non-negara. Tinjauan literatur yang komprehensif ini memberikan landasan yang kuat untuk mengidentifikasi tantangan, peluang, dan strategi mitigasi yang diperlukan bagi negara-negara ASEAN dalam menghadapi inisiatif ini di masa depan.

Selain aspek-aspek yang telah disebutkan sebelumnya, *literature review* mengenai BRI sebagai gerbang konektivitas di Asia Tenggara juga menyoroti implikasi geopolitik dari inisiatif ini. BRI tidak hanya dianggap sebagai proyek infrastruktur besar-besaran untuk meningkatkan konektivitas ekonomi, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat pengaruh politik dan strategis Tiongkok di kawasan tersebut. Beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh Chirathivat & Rutchatorn menekankan bahwa BRI dapat diinterpretasikan sebagai strategi geopolitik Tiongkok untuk memperluas pengaruhnya di Asia Tenggara, yang dapat mempengaruhi dinamika keamanan regional. Selain itu, tinjauan literatur juga menyoroti pentingnya kerja sama multilateral dan mekanisme pengaturan yang efektif dalam mengelola BRI. Mengingat skala dan kompleksitas BRI yang melibatkan banyak negara dan proyek infrastruktur yang besar, kerjasama regional dan internasional sangat penting untuk memastikan keberlanjutan proyek-proyek tersebut serta untuk meminimalkan konflik dan ketegangan antarnegara. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang menunjukkan bahwa koordinasi yang baik antar negara-

negara penerima BRI dapat mengoptimalkan manfaat ekonomi dan meminimalkan risiko politik dan keamanan.

Tinjauan literatur juga mencatat bahwa ada perdebatan tentang keberlanjutan keuangan dari proyek-proyek BRI, terutama terkait dengan kelayakan ekonomi jangka panjang dan potensi utang yang meningkat bagi negara-negara penerima. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa proyek-proyek BRI sering kali membutuhkan investasi besar yang mungkin tidak sebanding dengan manfaat ekonominya dalam jangka panjang, yang dapat meningkatkan risiko keuangan bagi negara-negara yang terlibat.

Selain itu, *literature review* juga menyoroti tantangan *governance* yang dihadapi oleh negara-negara penerima BRI dalam mengelola proyek-proyek tersebut. Keterlibatan yang intensif dari pemerintah Tiongkok dan perusahaan Tiongkok dalam proyek-proyek BRI sering kali menimbulkan kekhawatiran terkait transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi proyek. Peningkatan kapasitas administratif dan kelembagaan sering kali menjadi kunci untuk mengatasi tantangan-tantangan ini secara efektif. Terakhir, *literature review* juga mencakup analisis mengenai respons politik domestik terhadap BRI di negara-negara Asia Tenggara. Beberapa negara mungkin mengalami perubahan politik internal atau pergeseran dalam kebijakan luar negeri mereka sebagai hasil dari keterlibatan dalam inisiatif ini. Studi tentang dinamika politik domestik ini penting untuk memahami bagaimana BRI dapat mempengaruhi stabilitas politik regional dan hubungan antar negara di Asia Tenggara.

Secara keseluruhan, tinjauan literatur ini menunjukkan bahwa BRI memiliki dampak yang kompleks dan beragam di Asia Tenggara, yang meliputi aspek ekonomi, sosial, lingkungan, keuangan, *governance*, dan politik. Studi lanjutan yang mengintegrasikan pendekatan multidisiplin dan data empiris lebih lanjut diperlukan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak inisiatif ini serta untuk merumuskan strategi yang lebih baik dalam mengelola dan mengoptimalkan manfaatnya bagi negara-negara di kawasan ini. Secara keseluruhan, tinjauan literatur yang komprehensif ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang berbagai aspek dan dampak BRI di Asia Tenggara. Studi lanjutan yang berfokus pada integrasi data-data empiris dan analisis multidisiplin dari berbagai perspektif akan membantu menginformasikan kebijakan dan strategi untuk mengelola BRI dengan lebih efektif dan berkelanjutan di masa yang akan datang.

Secara keseluruhan, tinjauan literatur mengenai BRI menyoroti kompleksitas dan ambivalensi dalam dampaknya terhadap Asia Tenggara. Meskipun banyak penelitian menunjukkan potensi ekonomi yang signifikan, ada juga kekhawatiran terkait dengan implikasi politik, keamanan, dan kedaulatan nasional negara-negara ASEAN. Studi mendalam mengenai bagaimana negara-negara ASEAN menanggapi dan beradaptasi dengan BRI menjadi penting untuk memahami dinamika yang terus berubah di kawasan ini. BRI merupakan proyek inisiatif global yang digagas oleh Tiongkok pada tahun 2013 dengan tujuan membangun jaringan konektivitas yang meliputi jalur darat dan laut dari Asia Timur hingga Eropa. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan integrasi ekonomi, perdagangan, dan infrastruktur antar negara-negara yang terlibat. Di Asia Tenggara, BRI menjadi pusat perhatian karena kawasan ini dianggap strategis bagi Tiongkok dalam merancang koridor ekonomi baru serta memperluas pengaruh geopolitiknya.

BRI merupakan inisiatif global yang digagas oleh Tiongkok dengan tujuan membangun jaringan konektivitas yang luas melalui jalur darat dan laut, yang meliputi sebagian besar wilayah Asia Tenggara. Inisiatif ini diumumkan pada tahun 2013 oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping dan sejak itu menjadi fokus utama dalam diplomasi ekonomi Tiongkok di

tingkat internasional. Bagi Asia Tenggara, BRI dianggap sebagai gerbang untuk memperkuat integrasi regional dan meningkatkan konektivitas infrastruktur antarnegara. Melalui BRI, Tiongkok bertujuan untuk memperluas pengaruhnya secara ekonomi dan geopolitik di kawasan yang strategis ini. BRI yang diperkenalkan oleh Tiongkok telah menjadi fokus utama dalam pembangunan infrastruktur dan konektivitas di Asia Tenggara. Inisiatif ini bertujuan untuk memperluas jaringan perdagangan dan investasi melalui pembangunan infrastruktur yang menghubungkan lebih dari 60 negara di Asia, Eropa, dan Afrika. Bagi negara-negara ASEAN, BRI menawarkan peluang signifikan untuk meningkatkan konektivitas regional, mempercepat pembangunan ekonomi, dan memperluas akses pasar global. Namun demikian, implementasi BRI juga memunculkan tantangan terkait risiko keuangan dan dampak lingkungan yang perlu dikelola dengan hati-hati.

BRI yang digagas oleh Tiongkok telah memberikan dampak signifikan bagi Asia Tenggara secara keseluruhan. Inisiatif ini dirancang untuk memperluas jaringan infrastruktur dan konektivitas antar negara, mencakup proyek-proyek pembangunan seperti jalan tol, pelabuhan, dan kereta api di seluruh kawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi BRI telah memberikan dorongan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di sebagian besar negara-negara ASEAN, dengan meningkatkan aksesibilitas pasar dan memperluas jaringan perdagangan regional. Secara ekonomi, BRI di Asia Tenggara menjanjikan berbagai manfaat, termasuk investasi besar dalam proyek infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan proyek kereta api. Negara-negara di Asia Tenggara, seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand, melihat peluang untuk meningkatkan konektivitas regional mereka dengan dukungan dari Tiongkok. Namun, ada juga keprihatinan terkait dengan potensi dampak ekonomi jangka panjang, termasuk ketergantungan yang mungkin terjadi terhadap investasi dan utang Tiongkok, serta ketidakpastian politik yang terkait dengan implementasi proyek-proyek ini. Dari segi ekonomi, proyek-proyek BRI di Asia Tenggara telah membuka peluang baru untuk investasi dan perdagangan, serta meningkatkan konektivitas infrastruktur yang mendukung pertumbuhan sektor-sektor ekonomi utama seperti manufaktur dan jasa. Misalnya, di Indonesia, proyek-proyek BRI seperti pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara telah diharapkan dapat mengurangi biaya logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi.

Dalam konteks ekonomi, banyak penelitian menunjukkan bahwa proyek-proyek infrastruktur BRI di Asia Tenggara telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Misalnya, pembangunan jaringan transportasi yang lebih baik dan fasilitas infrastruktur lainnya telah meningkatkan konektivitas dan memfasilitasi perdagangan antar negara-negara di kawasan tersebut. Ini dapat diukur melalui peningkatan dalam volume perdagangan dan investasi langsung asing (FDI) yang masuk ke negara-negara penerima BRI. Ada juga tantangan keuangan yang dihadapi oleh negara-negara penerima. Beberapa negara mungkin mengalami peningkatan utang eksternal sebagai akibat dari pembiayaan proyek-proyek infrastruktur BRI. Data menunjukkan bahwa utang-utang ini kadang-kadang menjadi sumber kekhawatiran karena besarnya, terutama jika proyek-proyek tersebut tidak memberikan hasil ekonomi yang diharapkan atau jika keberlanjutan proyek dipertanyakan.

Namun demikian, implementasi BRI juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah terkait dengan risiko keuangan, khususnya terkait dengan utang luar negeri yang meningkat bagi beberapa negara penerima. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait dengan keberlanjutan proyek-proyek infrastruktur jangka panjang dan kemampuan negara-negara ASEAN untuk mengelola utang mereka secara efektif.

Di samping aspek ekonomi, BRI juga memiliki implikasi politik yang signifikan di Asia Tenggara. Dengan menggalang dukungan dari sejumlah negara dalam kawasan ini, Tiongkok memperkuat posisinya sebagai pemimpin regional dalam hal pengembangan infrastruktur dan integrasi ekonomi. Ini menciptakan dinamika baru dalam hubungan internasional di kawasan, dengan negara-negara ASEAN merespons dengan berbagai strategi untuk mengelola pengaruh Tiongkok secara seimbang, termasuk dengan cara melakukan hedging atau mencari kerjasama dengan negara-negara lain di luar Tiongkok. Dari perspektif lingkungan, pembangunan infrastruktur yang cepat sering kali berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan seperti deforestasi, degradasi habitat, dan peningkatan emisi karbon. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam perencanaan dan implementasi proyek BRI agar dapat meminimalkan dampak negatif tersebut dan menjaga keberlanjutan lingkungan di kawasan Asia Tenggara.

Pembangunan infrastruktur yang cepat sering kali memunculkan masalah lingkungan seperti deforestasi, degradasi habitat, dan peningkatan emisi karbon. Hal ini menunjukkan perlunya integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam setiap tahap perencanaan dan implementasi proyek BRI. Kolaborasi dengan masyarakat lokal dan organisasi lingkungan diharapkan dapat mengurangi dampak negatif ini dan memastikan bahwa pembangunan infrastruktur berkelanjutan untuk jangka panjang. Proyek-proyek BRI juga sering kali menimbulkan kekhawatiran terkait dampaknya terhadap lingkungan alam. Studi-studi telah menyoroti bahwa pembangunan infrastruktur besar dapat menyebabkan kerusakan lingkungan seperti deforestasi, degradasi tanah, dan perubahan iklim. Data yang lebih spesifik tentang dampak lingkungan ini dapat diambil dari penelitian terkait yang mengukur perubahan lingkungan sebelum dan setelah implementasi proyek-proyek BRI.

Namun demikian, BRI juga dihadapkan pada sejumlah tantangan di Asia Tenggara. Misalnya, adanya ketegangan geopolitik terkait klaim wilayah di Laut Cina Selatan telah menyulitkan implementasi BRI di negara-negara seperti Vietnam dan Filipina. Selain itu, isu-isu lingkungan, perlindungan hak asasi manusia, dan ketidakpastian politik di beberapa negara juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan proyek-proyek BRI. Oleh karena itu, Tiongkok perlu mengelola dinamika yang kompleks ini dengan hati-hati untuk memastikan keberhasilan jangka panjang dari inisiatif konektivitas ini di Asia Tenggara. Secara keamanan, BRI juga membawa implikasi terhadap keseimbangan kekuatan di Asia Tenggara. Kehadiran Tiongkok yang semakin dominan dalam aspek ekonomi melalui BRI dapat mempengaruhi dinamika kekuatan tradisional di kawasan, termasuk peran Amerika Serikat sebagai kekuatan regional utama. Hal ini menciptakan tantangan baru bagi negara-negara ASEAN dalam menjaga kemerdekaan dan kedaulatan mereka sambil mengelola hubungan dengan kedua kekuatan besar tersebut.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek-proyek BRI menjadi perhatian utama. Data menunjukkan bahwa ada variasi signifikan dalam kemampuan administratif dan kelembagaan di negara-negara penerima dalam mengelola proyek-proyek ini. Perbaikan dalam kapasitas administratif dan perbaikan dalam mekanisme pengawasan dan audit penting untuk mengatasi risiko-risiko *governance* yang terkait dengan BRI. Studi tentang respons politik domestik terhadap BRI juga memberikan wawasan penting. Data mengenai perubahan kebijakan luar negeri atau reaksi politik dalam negeri terhadap BRI dapat memberikan gambaran tentang bagaimana negara-negara di Asia Tenggara menanggapi inisiatif ini secara politis dan strategis.

Data-data tersebut memberikan konteks empiris yang diperlukan untuk mendukung analisis lebih lanjut mengenai dampak dan implikasi BRI di Asia Tenggara. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut yang menyeluruh dan mendalam untuk menggali lebih

dalam tentang berbagai aspek ini guna merumuskan kebijakan yang lebih baik dan berkelanjutan dalam mengelola inisiatif ini di masa depan. Secara keseluruhan, BRI adalah fenomena internasional yang memainkan peran penting dalam memperkuat hubungan ekonomi dan politik antara Tiongkok dan Asia Tenggara. Meskipun menawarkan peluang besar untuk pengembangan infrastruktur dan integrasi ekonomi regional, BRI juga dihadapkan pada tantangan dan keprihatinan yang perlu ditangani secara serius oleh semua pihak terlibat untuk memastikan keberhasilannya dalam jangka panjang.

Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar negara-negara anggota ASEAN telah menerima proyek-proyek infrastruktur yang diusung oleh BRI dari China. Penerimaan ini didasarkan pada persepsi bahwa BRI dapat meningkatkan konektivitas regional dan memfasilitasi perdagangan serta investasi lintas batas. Contohnya, pembangunan jaringan transportasi seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan telah dilihat sebagai langkah penting dalam memperkuat integrasi ekonomi di Asia Tenggara. Dampak ekonomi dari BRI di Asia Tenggara termasuk peningkatan aksesibilitas pasar dan fasilitas infrastruktur yang lebih baik, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi logistik dan daya saing regional. Namun, ada juga tantangan sosial seperti pengaruh sosial dan budaya dari hadirnya tenaga kerja asing serta potensi perubahan struktural dalam ekonomi lokal. Dinamika politik regional yang muncul sebagai akibat dari implementasi BRI meliputi respons berbagai pemerintah ASEAN terhadap dominasi ekonomi yang semakin kuat dari China.

Sementara beberapa negara menerima BRI sebagai kesempatan untuk pembangunan ekonomi yang lebih cepat, ada juga kekhawatiran terkait dengan potensi ketergantungan ekonomi yang lebih besar pada China serta pengaruh politik yang mungkin terjadi. Penelitian ini mengidentifikasi tantangan seperti masalah keuangan terkait dengan hutang luar negeri yang mungkin dihadapi oleh negara-negara ASEAN yang menerima investasi BRI. Namun demikian, ada juga peluang signifikan untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan integrasi ekonomi regional yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi kawasan. Secara keseluruhan, BRI memiliki potensi besar untuk menjadi gerbang konektivitas di Asia Tenggara dengan memfasilitasi pembangunan infrastruktur dan meningkatkan integrasi ekonomi regional. Namun, untuk mengoptimalkan manfaatnya, penting bagi negara-negara ASEAN untuk mempertimbangkan secara cermat dampak ekonomi, sosial, dan politik dari keterlibatan dalam inisiatif ini. Dengan demikian, penelitian ini menyediakan landasan untuk diskusi lebih lanjut tentang bagaimana ASEAN dapat mengelola dinamika kompleks yang dihadapi dalam konteks BRI.

Kepentingan nasional, atau yang dalam bahasa Prancis disebut sebagai *raison d'État*, merujuk pada tujuan dan ambisi negara dalam berbagai bidang seperti ekonomi, militer, atau budaya (Bainus & Rachman, 2018). Menurut teori hubungan internasional utama, kepentingan nasional menjadi dasar penting bagi negara-negara dalam menjalankan hubungan internasional mereka. Kepentingan nasional ini erat kaitannya dengan kekuatan yang dimiliki oleh suatu negara, yang dapat dibedakan menjadi kekuatan yang bersifat memaksa (*hard power*) (Krasner, 1978). Kekuatan ini digunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan nasional. Setelah berakhirnya era kolonial pada tahun 1960-an dan Perang Dingin pada tahun 1989, kepentingan nasional yang bersifat egois dan anarkis mulai digantikan oleh kepentingan yang lebih individualistik, altruistik, dan persuasif yang tidak bersifat destruktif (*soft power*). Perubahan ini melahirkan era di mana aktor non-negara, termasuk individu dan kelompok, mendapatkan pengaruh yang signifikan. Oleh karena itu, kekuatan dan kepentingan nasional dipandang sebagai

sarana untuk mencapai tujuan-tujuan negara dan memastikan kelangsungan hidupnya di arena global.

Untuk membuat keputusan dalam kebijakan luar negeri, penting bagi suatu negara untuk mengikuti dan mendasarkan pada kepentingan nasional mereka, yang berfokus pada perlindungan dan pemeliharaan identitas fisik, politik, ekonomi, dan budaya dari gangguan negara lain. Morgenthau memandang kepentingan nasional sebagai kebutuhan minimum suatu negara untuk melindungi diri, yang dapat dilakukan melalui kerjasama atau konflik dengan negara lain. Dalam pandangan neoliberalisme, kepentingan nasional sering kali ditumpukan pada stabilitas ekonomi dan pasar, yang dianggap penting untuk mempertahankan kesejahteraan negara. Setiap negara harus memprioritaskan kepentingan nasionalnya sendiri agar sistem global dapat berfungsi secara efektif. Kepentingan nasional juga menjadi fokus utama dalam keterlibatan negara dalam hubungan internasional dan kerjasama internasional dengan negara lain atau aktor non-negara, dengan harapan bahwa kerjasama tersebut akan menghasilkan manfaat bagi semua pihak yang terlibat

Penelitian ini menyoroti bahwa sebagian besar negara-negara ASEAN telah menerima proyek-proyek infrastruktur yang diinisiasi oleh BRI dari China dengan positif. Mereka melihat ini sebagai peluang untuk meningkatkan konektivitas regional dan memperkuat infrastruktur yang mendukung perdagangan serta investasi lintas batas. Pembangunan jaringan transportasi seperti jalan raya, jembatan, dan pelabuhan dianggap sebagai langkah krusial dalam mempercepat integrasi ekonomi di Asia Tenggara. Dampak ekonomi dari BRI di kawasan ini meliputi peningkatan aksesibilitas pasar, penurunan biaya logistik, dan peningkatan daya saing regional. Namun, terdapat tantangan sosial seperti perubahan dalam struktur tenaga kerja akibat hadirnya tenaga kerja asing serta pengaruh sosial dan budaya yang mungkin timbul dari proyek-proyek BRI. Dinamika politik regional yang muncul seiring dengan implementasi BRI mencakup respons berbagai pemerintah ASEAN terhadap dominasi ekonomi yang semakin kuat dari China. Beberapa negara menerima BRI sebagai kesempatan untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, sementara yang lain mengkhawatirkan ketergantungan ekonomi yang semakin besar pada China dan implikasi politik yang mungkin terjadi.

Tantangan utama yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN adalah terkait dengan masalah keuangan, khususnya terkait dengan hutang luar negeri yang mungkin diakibatkan oleh penerimaan investasi BRI. Namun, ada juga peluang signifikan untuk memperdalam integrasi ekonomi regional melalui akses pasar yang diperluas dan meningkatkan konektivitas infrastruktur yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi kawasan. Diskusi juga mencakup isu-isu terkait keamanan dan kedaulatan nasional. Negara-negara ASEAN perlu mempertimbangkan implikasi jangka panjang terhadap kedaulatan mereka ketika menerima investasi dan pembangunan infrastruktur dari China melalui BRI. Ini termasuk perlindungan terhadap hak-hak maritim dan lingkungan hidup, serta pengaruh politik yang dapat mempengaruhi kebijakan domestik.

Dinamika politik dan ekonomi di Asia Tenggara, termasuk tantangan infrastruktur yang signifikan dan lokasinya yang strategis di Asia Pasifik, membuat kawasan ini menjadi fokus utama dari BRI. Melalui BRI, China dapat memperdalam kemitraannya dengan negara-negara di Asia Tenggara yang telah memiliki hubungan perdagangan yang kuat dengan China, seperti Kamboja, Singapura, Malaysia, Myanmar, Thailand, dan Vietnam. BRI tidak hanya menjadi sarana untuk meningkatkan kerja sama ekonomi regional dan perdagangan, tetapi juga menjadi pijakan utama dalam diplomasi ekonomi China. Dokumen resmi berjudul "Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st Century Maritime Silk Road", yang dikeluarkan oleh Komisi Pembangunan

dan Reformasi Nasional, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Perdagangan China, mengusulkan lima rute utama BRI: (1) Central Asia-Russia; (2) Central Asia-West Asia; (3) Southeast Asia Selatan-Asia Selatan-Samudra Hindia; (4) Laut China Selatan-Samudra Hindia; dan (5) Laut China Selatan-Samudra Pasifik Selatan

Dalam implementasinya, BRI memprioritaskan peningkatan koordinasi kebijakan sebagai kerangka untuk mewujudkan dan mempromosikan kerjasama antarpemerintah. Hal ini melibatkan pertukaran kebijakan makro antarpemerintah, menciptakan mekanisme komunikasi multi-level, memperluas kepentingan bersama, membangun kepercayaan politik saling menguntungkan, dan mencapai kesepakatan kerjasama. China menekankan bahwa negara-negara yang terlibat dalam inisiatif BRI seharusnya sejalan dalam strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi mereka, merumuskan rencana dan tindakan kerjasama regional, terlibat dalam negosiasi untuk menyelesaikan masalah terkait kerjasama, dan memberikan dukungan kebijakan bersama untuk kerjasama praktis dan proyek-proyek besar.

Dengan terus berkembangnya kegiatan perdagangan internasional, terutama di Indonesia, regulasi diperlukan untuk meningkatkan penegakan hukum dalam perdagangan internasional dan melindungi hak serta kewajiban para pelaku dalam kemitraan perdagangan internasional. Dalam upaya untuk menetapkan aturan hukum yang mengatur perdagangan internasional, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan disahkan sebagai dasar bagi setiap kebijakan dan pengawasan di bidang perdagangan internasional. Ketentuan mengenai kerja sama internasional dalam undang-undang ini bertujuan untuk memperluas akses terhadap kerja sama perdagangan internasional di era globalisasi sambil tetap mengutamakan kepentingan nasional tanpa meninggalkan prinsip perdagangan bebas global. Selain itu, Undang-Undang Perdagangan juga mengatur mengenai kerja sama perdagangan internasional sebagai bagian dari bidang perdagangan luar negeri. Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyatakan bahwa kerja sama perdagangan internasional adalah sebagai berikut: "Kegiatan pemerintah untuk memperjuangkan dan mengamankan kepentingan nasional melalui hubungan perdagangan dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional."

BRI di Asia Tenggara telah menimbulkan berbagai dampak positif, termasuk peningkatan infrastruktur yang mendukung konektivitas regional dan internasional. Proyek-proyek seperti pembangunan pelabuhan, rel kereta api, dan jalan raya telah memperbaiki aksesibilitas dan mobilitas barang dan orang di kawasan ini. Ini tidak hanya mempercepat aliran barang dan layanan, tetapi juga mengurangi biaya logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Dengan infrastruktur yang lebih baik, potensi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di kawasan ini semakin terbuka. Meskipun adanya manfaat infrastruktur yang signifikan, BRI juga menimbulkan sejumlah tantangan dan risiko di Asia Tenggara. Salah satunya adalah masalah hutang luar negeri yang meningkat di beberapa negara penerima proyek BRI. Tantangan lain termasuk kekhawatiran akan dominasi politik dan ekonomi Tiongkok di kawasan ini, serta dampak lingkungan dari proyek-proyek infrastruktur besar. Negara-negara di Asia Tenggara perlu memastikan bahwa partisipasi mereka dalam BRI memberikan manfaat jangka panjang yang seimbang dan berkelanjutan bagi pembangunan ekonomi mereka, sambil menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional mereka.

BRI juga berdampak pada dinamika politik regional di Asia Tenggara. Inisiatif ini telah memperdalam hubungan antara Tiongkok dengan negara-negara ASEAN, menawarkan peluang bagi Tiongkok untuk memperluas pengaruhnya di kawasan ini melalui

diplomasi ekonomi dan proyek kerja sama multilateral. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kemandirian politik ASEAN dan potensi pergeseran dalam arsitektur keamanan regional. Di sisi lain, BRI juga menghadirkan peluang untuk meningkatkan integrasi regional di Asia Tenggara, yang dapat menguatkan kedudukan kawasan ini dalam ekonomi global dan geopolitik. Untuk mengoptimalkan manfaat BRI bagi Asia Tenggara, diperlukan koordinasi yang erat antara negara-negara ASEAN dan Tiongkok. Perlu adanya mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan proyek-proyek BRI, serta upaya untuk mengatasi tantangan seperti keberlanjutan lingkungan dan risiko keuangan. ASEAN harus tetap menjaga kesatuan dalam menanggapi dinamika BRI, sambil memastikan bahwa kerja sama ini memberikan manfaat yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat.

Penting untuk mengakui bahwa BRI bukan hanya tentang infrastruktur fisik semata, tetapi juga mencakup dimensi ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang lebih luas. Melalui BRI, Tiongkok berupaya untuk mempromosikan integrasi ekonomi regional yang lebih dalam dan membangun jaringan kerja sama multilateral yang kuat. Misalnya, pembangunan koridor ekonomi baru di Asia Tenggara dapat mengarah pada integrasi rantai pasok regional yang lebih efisien dan inklusif. Selain itu, BRI juga mencakup inisiatif untuk memperluas kerjasama dalam bidang pendidikan, pariwisata, dan budaya antara Tiongkok dan negara-negara Asia Tenggara, yang dapat memperkuat hubungan antarbangsa dan meningkatkan pemahaman lintas budaya.

Dalam mengimplementasikan BRI, penting untuk mengatasi beberapa tantangan yang ada. Di antaranya adalah transparansi dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek, manajemen risiko finansial, serta memastikan bahwa proyek-proyek tersebut sesuai dengan kebutuhan pembangunan berkelanjutan dan tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat lokal. Negara-negara di Asia Tenggara juga perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional mereka dan manfaat jangka panjang dari partisipasi dalam BRI. Dengan demikian, BRI memiliki potensi untuk menjadi gerbang baru bagi konektivitas ekonomi di Asia Tenggara, tetapi pengelolaan yang bijaksana dan kolaboratif antara Tiongkok dan negara-negara ASEAN adalah kunci keberhasilannya. ASEAN harus memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh BRI untuk memperkuat posisinya dalam ekonomi global, sambil tetap menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional masing-masing. Dengan demikian, kerja sama ini dapat berpotensi mengubah lanskap ekonomi dan politik regional, jika dikelola dengan tepat dan dalam semangat saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

BRI juga menciptakan peluang baru bagi peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara. Dengan adanya infrastruktur yang lebih baik dan konektivitas yang diperkuat, diharapkan akan terjadi peningkatan dalam investasi langsung asing (FDI) serta pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang terkait. Ini bisa menjadi dorongan penting bagi negara-negara ASEAN yang mencari cara untuk meningkatkan daya saing ekonomi mereka di tingkat global. Namun demikian, untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi dari BRI, diperlukan kebijakan internal yang tepat, regulasi yang jelas, dan kepastian hukum untuk menarik investasi yang berkelanjutan dan berkelanjutan. BRI juga dapat mempengaruhi dinamika politik regional di Asia Tenggara. Dengan memperdalam ketergantungan ekonomi pada Tiongkok melalui investasi dan infrastruktur yang disediakan oleh BRI, negara-negara di kawasan ini mungkin akan menghadapi tekanan politik yang meningkat dari Tiongkok. Hal ini bisa mempengaruhi kebijakan luar negeri mereka, termasuk dalam isu-isu sensitif seperti klaim wilayah maritim di Laut Cina Selatan. Selain itu, meningkatnya kehadiran Tiongkok melalui BRI juga dapat menimbulkan ketegangan dengan negara-negara lain di kawasan yang mungkin merasa terancam oleh dominasi ekonomi dan politik Tiongkok.

Secara keseluruhan, BRI memunculkan pertanyaan tentang arah integrasi ekonomi global di abad ke-21. Meskipun BRI menawarkan peluang signifikan bagi pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara, pendekatan ini juga memiliki risiko dan tantangan yang perlu diatasi secara hati-hati. Selain itu, dampak jangka panjang dari BRI terhadap stabilitas politik, lingkungan, dan sosial di kawasan ini perlu dipertimbangkan dengan cermat. Oleh karena itu, evaluasi terus-menerus atas pelaksanaan BRI dan pengaruhnya terhadap Asia Tenggara diperlukan untuk memastikan bahwa kerja sama ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat, sambil menjaga keamanan dan kestabilan regional.

Kesimpulan

Studi tentang BRI sebagai gerbang konektivitas di Asia Tenggara menyoroti dampak dan implikasi inisiatif ini terhadap ekonomi, politik, dan infrastruktur regional. BRI, yang diinisiasi oleh Tiongkok pada tahun 2013, bertujuan untuk memperluas jaringan infrastruktur dan memfasilitasi perdagangan serta investasi antarnegara. Dalam konteks Asia Tenggara, BRI telah mempengaruhi secara signifikan dinamika ekonomi kawasan dengan menyediakan sumber pendanaan untuk proyek infrastruktur besar-besaran, seperti pembangunan pelabuhan, jalan raya, dan jaringan kereta api. Hal ini memberikan peluang bagi negara-negara di Asia Tenggara untuk meningkatkan konektivitas mereka dengan Tiongkok dan negara-negara lain di jalur BRI. Selain manfaat ekonomi, BRI juga menimbulkan tantangan dan kekhawatiran. Beberapa negara di Asia Tenggara menghadapi risiko terkait utang yang meningkat akibat pembiayaan proyek BRI, serta kekhawatiran akan dominasi ekonomi dan politik Tiongkok dalam jangka panjang. Implikasi politik dari BRI juga menjadi sorotan, di mana Tiongkok menggunakan inisiatif ini sebagai alat untuk memperluas pengaruh politiknya di kawasan, sering kali dengan memanfaatkan proyek infrastruktur sebagai *leverage* politik.

Di samping itu, tantangan utama yang dihadapi oleh negara-negara di Asia Tenggara adalah bagaimana mereka mengelola hubungan dengan Tiongkok secara seimbang, memaksimalkan manfaat ekonomi dari BRI tanpa mengorbankan kedaulatan dan kepentingan nasional mereka sendiri. Kerjasama regional dan inisiatif seperti ASEAN Connectivity juga menjadi penting untuk memastikan bahwa proyek BRI dapat berkontribusi secara positif terhadap integrasi ekonomi dan stabilitas politik di Asia Tenggara. Kesimpulannya, BRI memperlihatkan kompleksitas dinamika geopolitik dan ekonomi di Asia Tenggara, yang memerlukan pendekatan yang hati-hati dan strategis dari negara-negara kawasan untuk mengelola dampaknya secara efektif demi kepentingan bersama. Tantangan lain yang harus diatasi dalam menghadapi BRI di Asia Tenggara adalah perlunya transparansi dan tata kelola yang baik dalam pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur. Masalah terkait dengan transparansi dalam penawaran proyek dan kebijakan pengadaan, serta risiko korupsi yang mungkin muncul, menjadi perhatian serius bagi negara-negara penerima dan pihak yang terlibat dalam implementasi BRI. Selain itu, pemenuhan standar lingkungan dan sosial dalam proyek-proyek tersebut juga menjadi isu krusial, mengingat dampak yang bisa ditimbulkan terhadap lingkungan dan masyarakat setempat.

Dari sudut pandang ekonomi, BRI membawa potensi untuk meningkatkan akses pasar bagi negara-negara di Asia Tenggara ke pasar global melalui peningkatan konektivitas infrastruktur. Hal ini dapat mendukung diversifikasi ekonomi regional dan meningkatkan daya saing industri-industri lokal dalam rantai pasokan global. Namun, untuk mengoptimalkan manfaat ini, diperlukan strategi pengembangan ekonomi yang terintegrasi, termasuk peningkatan kemampuan manusia dan penguatan regulasi bisnis

yang sesuai dengan standar internasional. Dalam menghadapi dinamika BRI di Asia Tenggara, kolaborasi multilateral dan diplomasi regional sangat penting. ASEAN sebagai forum regional memiliki peran sentral dalam memfasilitasi dialog dan kerja sama antara negara-negara anggotanya dengan Tiongkok. Kerjasama ini mencakup peningkatan infrastruktur, investasi, dan perdagangan yang berkelanjutan serta berimbang. Selain itu, mekanisme transparansi dan akuntabilitas yang kuat perlu diperkuat untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam BRI dapat saling menguntungkan dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Dalam kesimpulan, BRI tidak hanya menjadi gerbang konektivitas infrastruktur di Asia Tenggara tetapi juga membawa tantangan dan peluang yang besar. Negara-negara di kawasan ini perlu menjaga keseimbangan antara keuntungan ekonomi jangka pendek dan kepentingan strategis jangka panjang mereka. Dengan pendekatan yang hati-hati dan berbasis prinsip-prinsip tata kelola yang baik, BRI dapat menjadi katalisator untuk pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Asia Tenggara.

Daftar Pustaka

- Agustian, M. R., Nizmi, Y. E., & Waluyo, T. J. (2021). Analisis Masuknya Belt And Road Initiative Tiongkok Ke Asean Dan Identitas Yang Dipromosikan Tiongkok, 5, 9213–9221.
- Albana, A., & Fiori, A. (2021). China And The Bri : Challenges And Opportunities For Southeast Asia, 149–159.
- Amaliyah, F., & Muhaimin, R. (2023). Kepentingan Tiongkok Melalui Belt And Road Initiative (Bri) Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Sulawesi Utara 2017-2022. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 6(2), 1222–1238.
- Belt & Road News. (2019). All Under Heaven: China's Challenge To The Westphalian System. Diakses 29 Juni 2019 <https://www.beltandroad.news/2019/01/12/all-under-heaven-chinas-challenge-to-the-westphalian-system>
- Bin, A. (2023). Assessing The Role Of Sustainable Construction Practices In The One Belt One Road Initiative: A Comparative Analysis Of China And Southeast Asian Countries. *Journal Of Digitainability, Realism & Mastery (Dream)*, 2(02), 39–44. <https://doi.org/10.56982/dream.v2i02.86>
- Callahan, W. (2016). Chinas "Asia Dream": The Belt Road Initiative And The New Regional Order. *Asian Journal Of Comparative Politics*, 1. <https://doi.org/10.1177/2057891116647806>
- Chirathivat, S., & Rutchatorn, B. (2022). *China ' S Belt And Road Initiative And Its Implications For Asean : An Introduction **, 1–22.
- Devi, Y. P. A. (2023). *Posisi Negara-Negara Asia Tenggara Dalam Menghadapi Belt And Road Initiative Di Tengah Kompetisi Kekuatan Di Antara Tiongkok Dan Amerika Serikat*.
- Dewi, R. F. (2024). China's Belt And Road (Bri) Policy For Trade Interests In Indonesia. *Jurnal Suara Hukum*, 6(1), 144–159.
- Dwipradinatha, K. A. S., Sushanti, S., & Nugraha, A. A. B. S. W. (2024). Kepentingan Ekonomi Filipina Terhadap Tiongkok Melalui Kerangka Belt And Road Initiative Tahun 2018. *Diskusi Ilmiah Komunitas Hubungan Internasional*, 3(2), 457–467.
- Holslag, J. (2017). How China's New Silk Road Threatens European Trade. *The International Spectator*, 52, 46–60. <https://doi.org/10.1080/03932729.2017.1261517>

- Iseas, R. A. T. (2021). *The Belt And Road Initiative In Southeast Asia After Covid-19 : China ' S Energy And Infrastructure Investments In Myanmar*, (39), 1–9.
- Kong, U. O. B. H. (2020). *The Belt And Road Initiative In Asean*, (December).
- Kusumawardhana, I. (2023). *Diplomasi Triangular China Terhadap Indonesia Dalam Mengantisipasi Dilema Malaka Melalui Belt Road Initiative*. *Thejournalish: Social And Government*, 4(2), 173–189. <https://doi.org/10.55314/Tsg.V4i2.485>
- Lechner, A. M., Tan, C. M., Tritto, A., Horstmann, A., Teo, H. C., Owen, J. R., & Campos-Arceiz, A. (2019). The Belt and Road Initiative: Environmental impacts in Southeast Asia. In *ISEAS Publishing eBooks* (pp. 1–23). <https://doi.org/10.1355/9789814881432-002>
- Lubis, M. H. (2024). *Pengaruh Kebijakan One Belt One Road Terhadap Ekonomi Global*, 1–12.
- Mahendra, Y. I., Ramadhono, R. I., & Suhermanto, D. F. (2023). Pengaruh Kebijakan Belt And Road Initiative Tiongkok Terhadap Stabilitas Sub-Kompleks Keamanan Asia Tenggara. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 19(2), 156–174. <https://doi.org/10.26593/Jihi.V19i2.5788.156-174>
- Masduki, A., Jian, L., & Niu, P. (2023). Media Views In Indonesia On The Belt And Road Initiative Policy : A Study Of Indonesian New Media Reports To The Bri Project Of China In Indonesia. *International Journal Of Communication And Society*, 5(1), 16–28. <https://doi.org/10.31763/Ijcs.V5i1.1019>
- Masina, P., 2022. *Challenging The Belt And Road Initiative: The American And European Alternatives*, Robert Schuman Centre For Advanced Studies Research Paper, No. 9
- Pusparani, M. (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Sumber Daya Manusia). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(4), 534–543. <https://doi.org/10.31933/Jimt.V2i4>
- Putri, S. Y., & Ma'arif, D. (2019). Kerja Sama Ekonomi-Politik Indonesia Dan Cina Pada Implementasi Program Belt And Road Initiative. *Jurnal Kajian Lemhannas Ri*, 53–66.
- Putu, N., Puspita, S., & Akbar, H. (N.D.). *Kebijakan The New Silk Road Cina Di Bawah*, 1–19.
- Rabena, J. A., 2018. “The Complex Interdependence Of China's Belt And Road Initiative In The Philippines”, *Asia & The Pacific Policy Studies*, 5(3): 683-697.
- Saraswati, N. M. V. (2019). Menilik Perjanjian Indonesia-Cina Dalam Kerangka Belt And Road Initiative (Bri) Dalam Perspektif Ketahanan Nasional. *Jurnal Kajian Lemhannas Ri*, (38), 56–70.
- Studies, G. (2021). *Adapting Or Atrophying: China ' S Belt And Road After The Covid-19 Pandemic*.
- Susanto, D. (2022). Belt Road Initiative (Bri) Dan Kerangka Kebijakan Hukum Ekonomi Indonesia. *Jueb : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(3), 82–89. <https://doi.org/10.55784/Jueb.V1i3.272>.
- The Institute For Democracy And Economic Affairs (Ideas) .2020. East Coast Rail Link (ECRL). BRI Monitor
- Trinh, D. V., 2022. “South East Asian Countries' Policies Toward A Rising China: Lessons From Vietnam's Hedging Response To The Belt And Road Initiative”, *South East Asia Research*, 30(2): 237-254.
- Verianto, J. R. (2019). Kebangkitan China Melalui Belt And Road Initiative Dan (Re)Konstruksi Hubungan Internasional Dalam Sistem Westphalia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 8(1), 1–11. <https://doi.org/10.18196/Hi.81141>
- Wahyuni, A. S., & Amin, K. (2023). One Belt One Road Dan Upaya Hegemoni Regional China Di Asia Tenggara. *Jurnal Sosial Politik*, 9(1), 114–128. <https://doi.org/10.22219/Journalsopol.V9i1.25621>

- Xiong, H. (2024). The Research On The Impact Of China-US “The Belt And Road” Reporting On The Perception Of Indonesian Citizens. *Journal Of Education, Humanities And Social Sciences*, 28, 332–339.
- Yuniarto, R. (2021). Opportunities And Challenges Of Socio-Cultural Cooperation In China’s Belt And Road Initiative In Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 9(2), 98–111. <https://doi.org/10.18196/jhi.v9i2.8232>
- Yusuf, S. (2018). China’s Belt And Road Gamble: Can It Deliver? - The Sais Review Of International Affairs. Retrieved From https://saisreview.sais.jhu.edu/chinas-belt-and-road-gamble-can-it-deliver/#_ftn
- Zuliyani, M. A., Alfian, M. F., & Weiwei, G. (2024). The Rise Of China In The 21st Century On Belt And Road Initiative: The Implication To Indonesia Development. *Journal Of Chinese Interdisciplinary Studies*, 1(2), 27–37.